

## ABSTRAK

Notaris mempunyai kewenangan hukum untuk pembuatan akta otentik. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, sedangkan metode pengumpulan data Penulis menggunakan wawancara dan studi pustaka.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui teknis pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD Kota Surakarta, Peran dan Fungsi MPD Kota Surakarta dan untuk mengetahui efektifitas pengawasan MPD Kota Surakarta dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta antara lain: melakukan pemeriksaan protokol Notaris, melakukan pembinaan dan penyuluhan, memberikan persetujuan/izin sehubungan dengan kepentingan proses peradilan pidana untuk memanggil dan memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kinerja Notaris Kota Surakarta antara lain: Notaris Kota Surakarta kurang tertib dalam pembuatan dan pelaporan protokol Notaris, keberadaan Notaris yang tidak diketahui kedudukan/alamat kantornya, dan Notaris yang jarang berada dikantor sehingga sulit untuk menemuinya. Hambatan-hambatan yang dialami MPD Kota Surakarta antara lain: kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan waktu para anggota MPD Kota Surakarta yang sibuk dengan tugas pokok masing-masing, anggaran yang terbatas, MPD tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci:** *Peran dan Kewenangan MPD, Pengawasan Notaris, Pembinaan Notaris.*

## **ABSTRACT**

*Notary has legal authority to make authentic deeds. In order to improve the quality and quantity of the Notary, a new regulation applies to Notaries, namely the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR08.10 of 2004 concerning Procedures for Appointment of Members, Dismissal of Members, Organizational Structure, Governance Work and Procedure for Inspection of the Notary Supervisory Board. Along with the accountability of Notaries to the public in carrying out their duties, it must be guaranteed by the existence of supervision and guidance. In this study the author uses an empirical juridical approach method, while the data collection method the author uses interviews and literature studies. The purpose of this study was to determine the technical implementation of Notary supervision carried out by the Surakarta Regional Supervisory Board, the Role and Function of the Surakarta Regional Oversight Council and to determine the effectiveness of the supervision of the Surakarta Regional Supervisory Board in carrying out Notary supervision in its territory. The results showed that the implementation of supervision of Notaries by the Surakarta Regional Supervisory Board included: conducting a Notary protocol examination, conducting guidance and counseling, giving consent / permission in connection with the interests of the criminal justice process to summon and examine the Notary in relation to the deed he made. The performance of the Surakarta Notary included: The Surakarta Notary was less orderly in the making and reporting of the Notary protocol, the presence of a Notary who was not known of the position / address of his office, and a Notary who was rarely in the office so it was difficult to meet him. The obstacles experienced by the Surakarta Regional Oversight Council include: lack of adequate facilities and infrastructure, limited time for members of the Surakarta Regional Supervisory Board who are busy with their respective main tasks, a limited budget, the Regional Oversight Council does not have the authority to impose sanctions on Notary who violates the Notary Position Law.*

**Keywords:** *Role and Authority of Regional Supervisory Board, Notary Supervision, Notary Development.*